

SKRIPSI

**KEKUATAN POLITIK H. SAMSUL MAHMUD PADA PILKADA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

MUHAMMAD NIRWANSYAH

F0118507

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **KEKUATAN POLITIK H. SAMSUL MAHMUD
PADA PILKADA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024**

NAMA : **MUHAMMAD NIRWANSYAH**

NIM : **F0118507**

PROGRAM STUDI : **ILMU POLITIK**

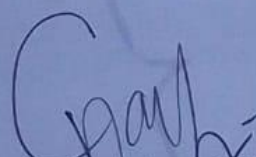
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (SI)

Majene, 16 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Citra N. Fariaty, S.IP, M.Si
NIP. 199201262018032001

Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198709232019031007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



SKRIPSI

KEKUATAN POLITIK H. SAMSUL MAHMUD PADA PILKADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

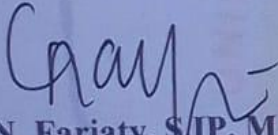
Disiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD NIRWANSYAH
F0118507

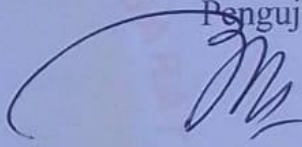
Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I


Citra N. Fariaty, S.IP, M.Si
NIP. 199201262018032001

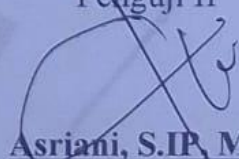
Penguji I


Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP. 19620919 198903 1004

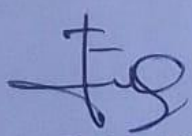
Pembimbing II


Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198709232019031007

Penguji II


Asriani, S.IP, M.Si
NIP. 198406242019032017

Penguji III


Pahrudin, S.IP, M.Si
NIPPPK. 197801112024211004

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dinamika politik di polewali mandar yang menunjukkan persaingan ketat antar kandidat. Maka, focus penelitian ini seberapa besar modal dalam konteks kekuatan politik H. samsul Mahmud dalam membangun basis politiknya pada pilkada polman 2024. H. samsul Mahmud merupakan salah satu aktor politik yang menarik perhatian karena memiliki latar belakang sebagai pengusaha sekaligus politisi dengan jejaring dan basis sosial yang cukup mumpuni. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi modal politik, modal ekonomi dan modal sosial H. Samsul Mahmud pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2024. Prosedur penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literature. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 3 orang dari berbagai latar belakang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal politik H. Samsul Mahmud yakni Partai Golkar dan kedekatan dengan figure serta elit politik lokal, kedua modal politik ini memiliki basis massa yang signifikan. Modal ekonomi Aji Assul dikumpulkan dari aset yang dimiliki seperti perusahaan hasil bumi, sawah, empang, tambak udang, minimarket dan sebagainya. Dengan kecukupan modal ekonomi, juga terhubung pada modal sosial H. Samsul Mahmud dalam merealisasikan beberapa program sosial di masyarakat terutama yang berkenaan dengan keagamaan. H. Samsul Mahmud memiliki hubungan erat dengan beberapa tokoh agama seperti KH. Muhammad Ilham Saleh.

Kata Kunci: Modal Politik, Modal Ekonomi, Modal Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan daerah secara damai dan teratur. Melalui Pilkada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan pembenaran (legitimasi) kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah, melalui Pilkada perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pilkada langsung adalah pemenuhan prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik. Dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraannya.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tahun 2024 digelar secara serentak untuk daerah – daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia kecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih, begitu juga terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta

Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang Bupati dan Wali Kotanya ditunjuk oleh Gubernur. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 kota.

Selain menjadi pemenuhan prinsip demokrasi pilkada juga merupakan sebuah ajang bagi aktor atau elit politik lokal memperebutkan kepercayaan masyarakat, terlebih masyarakat yang masih dikategorikan pemilih tradisional, sehingga tidak menutup kemungkinan kandidat di pilkada sebelumnya akan muncul lagi di pilkada selanjutnya. Kekuasaan politik selalu dijalankan oleh minoritas (elit). Perbedaan antara sistem totaliter dan demokrasi adalah bahwa dalam sistem pertama diperintah oleh kelompok minoritas, sementara yang kedua dapat diganti oleh kelompok mayoritas atau dipaksa untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka (Manhein, 1956).

Metamorfosis kekuatan-kekuatan politik Indonesia satu periode politik ke periode politik lainnya selalu diwarnai oleh emosi, kepentingan, dan ideology. Proses pembentukan kekuatan politik pada awal kemerdekaan ditentukan oleh watak dan karakter membangun negara yang demokratis, begitu terjadi modernisasi dan politik Indonesia semakin otoriter, pembentukan kekuatan politik sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan. Pemerintah mengendalikan partai politik secara ketat pada kekuasaan Orde Baru, dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar).

Kompetisi gagasan politik tidak menyertai perjalanan kekuatan-kekuatan politik Indonesia, mereka hanya mungkin memainkan peranan dalam mengimplementasikan rumusan normatif negara tentang kehidupan ekonomi, sosial, tata negara, agama, pendidikan dan sebagainya. Kekuatan politik tidak hanya miskin gagasan, tetapi secara tidak langsung berada dalam kooptasi dan hegemoni negara. Elit-elit partai merupakan orang-orang kepercayaan penguasa yang didistribusi untuk mengamankan kepentingan nasional yakni kepentingan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk alasan-alasan pembangunan ekonomi dan stabilitas, politik dan hukum harus dikorbankan bahkan untuk alasan tertentu demokrasi diabaikan. Kelompok dominan dalam masyarakat mempertahankan kekuasaan mereka bukan hanya melalui kekerasan atau paksaan (coercion), tetapi juga melalui persetujuan (consent) yang diperoleh dari kelompok subordinat (Antonio Gramsci, 1957).

Kekuatan politik ketika dilihat dari sudut pandang aktor politik adalah mereka yang memiliki pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor politik berkaitan seberapa besar pengaruh seseorang pada pembuatan kebijakan pemerintahan. Berkaitan halnya dengan pengertian individu, kekuatan politik sebagai lembaga adalah dengan memainkan peranan dalam proses penyelenggaraannya yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Pada pengertian dua hal tersebut, pembangunan politik di Indonesia semakin meningkat dengan lahirnya aktor-aktor maupun lembaga-lembaga politik yang menjadi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Fenomena politik lokal yang didominasi oleh kalangan aktor politik merupakan sebuah fenomena politik yang melibatkan keikutsertaan keluarga (anak, istri, suami dan kerabat lainnya) didalam ranah politik seperti: pilkada, pileg maupun dalam penempatan posisi jabatan lainnya (Purwaningsih, 2015).

Dominasi kekuasaan ditingkat lokal oleh para aktor politik hampir terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Di Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Polewali Mandar juga tidak bisa lepas dari aktor dan elit politik. Ada tiga klan mendominasi perebutan kekuasaan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Klan Manggabarani, Klan Mengga dan Klan Masdar. Akan tetapi, dalam tulisan ini lebih menitikberatkan kepada salah satu aktor politik yang tidak termasuk dalam ketiga klan diatas yakni H. Samsul Mahmud, namun memiliki keterhubungan dengan salah satu klan yakni klan Masdar setelah memilih Hj. Andi Nursami Masdar sebagai wakil calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2024 mendatang. Menurut Roberto Michels bahwa arus sejarah demokrasi mirip gelombang laut yang saling bergantian. Mereka selalu hancur pada tepian yang sama (1949).

Adi Arwan Alimin mengungkapkan bahwa seleksi kepemimpinan di Mandar telah mengenal standar *tomaka anna sitinaya* (patut dan layak) ada pula yang menambahkan *naratang* (pantas), sejatinya pola umum yang mengharuskan setiap pemimpin di level manapun memiliki kompetensi, keunggulan, kepantasan dan nilai-nilai leluhur lainnya. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di bulan November 2024,

sejumlah kandidat calon pengganti Andi Ibrahim Masdar sudah mulai melakukan tahapan kampanye di berbagai wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar atau lebih dikenal dengan akronim “ASSAMI” secara resmi telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Pendaftaran itu dihadiri oleh 3.500 simpatisan pendukung yang berasal dari berbagai kalangan tim relawan dan simpatisan partai politik pengusung. Pasangan ASSAMI tiba di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 10 : 15 Waktu Indonesia Tengah (Wita) pada Kamis, 29 Agustus 2024. Sebelumnya massa berkumpul di Lapangan Pancasila Polewali dan berjalan kaki menuju kantor KPU sambil diiringi musik tradisional *parrabana* yang merupakan khas mandar.

H. Samsul Mahmud merupakan putra daerah Kabupaten Polewali Mandar lahir di Baru, 21 Desember 1977. Pria yang akrab disapa Aji Assul merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar sekaligus pemilik PT Bumi Surya Selaras. Berikut riwayat pendidikan H. Samsul Mahmud:

1. SDN 041 Puccadi (1985-1990)
2. SMPN 02 Campalagian (1990-1993)
3. SMAN 1 Campalagian (1993-1996)
4. S1 Universitas Al Asyariah Mandar (2008-2012)

Pengalaman Politik yang sudah teruji serta pengalaman di sektor usaha hasil bumi membuatnya memahami kebutuhan akar rumput dan telah berperan dalam berbagai kegiatan – kegiatan sosial. Berikut rekam jejak Aji Assul mulai dari bidang politik, ekonomi dan sosial :

1. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar (2018- 2020) dan (2020-2025)
2. Bendahara HIPMI Provinsi Sulawesi Barat (2014 – 2016)
3. Ketua HIPMI Kabupaten Polewali Mandar (2011 – 2021)
4. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Polman (2015-2024)
5. Wakil Ketua KADIN Sulawesi Barat
6. Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 1 Campalagian
7. Ketua KNPI Kecamatan Luyo
8. Direktur Utama PT Bumi Surya Selaras .

Aji Assul membuktikan bahwa dia memiliki keuletan dalam bekerja serta pengalaman dalam mengelola perusahaan, sehingga PT Bumi Surya Selaras meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) sebagai salah satu Badan Pembayar Pajak terbaik pada tahun 2022.

H. Samsul Mahmud dikenal sebagai pengusaha dengan jaringan luas dikalangan masyarakat Polman terutama di wilayah pedesaan, sehingga mendapatkan popularitas dan elektabilitas yang tinggi di mata masyarakat

Polewali Mandar. H. Samsul Mahmud memiliki usaha hasil bumi yakni PT Bumi Surya Selaras yang secara langsung bermitra dengan perusahaan pengolahan kakao Sustain Barry Callebaut di Swiss. Pendampingan dan pelayanan kepada para petani kakao menghasilkan produksi kakao yang meningkat serta kepercayaan masyarakat dalam bermitra dengan PT BSS juga semakin solid.

Berdasarkan pengamatan penulis, H. Samsul Mahmud merupakan salah seorang aktor politik sekaligus pengusaha yang memiliki pengalaman cukup mumpuni dalam hal pelayanan serta interaksi terhadap semua golongan masyarakat. Menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar dan Direktur PT BSS yang bergelut di bidang usaha hasil bumi seperti kakao, kopra dan kemiri, memungkinkan untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sehingga menjadi modal penting untuk memenangkan Pemilihan Bupati Polewali Mandar 2024.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2024 merupakan momen strategis bagi kabupaten Polewali Mandar untuk lebih maju. Perubahan di suatu wilayah selalu berawal dari aktor politiknya sebagai pelayan masyarakat dan menjadi pendorong terciptanya kondusivitas perpolitikan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dinamika politik di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan persaingan ketat antar kandidat. Maka, focus penelitian ini seberapa besar modal dalam konteks kekuatan politik H. Samsul Mahmud dalam membangun basis politik pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024. H. Samsul Mahmud merupakan

salah satu aktor yang menarik perhatian karena latar belakang sebagai pengusaha sekaligus politisi dengan jejaring dan basis sosial yang cukup mumpuni. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul KEKUATAN POLITIK H. SAMSUL MAHMUD PADA PILKADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024. Dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan penulisan ini adalah sebagai berikut:

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana modal politik H. Samsul Mahmud pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024?
2. Bagaimana modal ekonomi H. Samsul Mahmud pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024?
3. Bagaimana modal sosial yang dimiliki H. Samsul Mahmud dalam konteks persaingan membangun kekuatan politik pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi modal politik H. Samsul Mahmud pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024.
2. Mengidentifikasi modal ekonomi H. Samsul Mahmud pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024.
3. Mengidentifikasi modal sosial H. Samsul Mahmud pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam studi ilmu politik, khususnya dalam memahami factor-faktor kekuatan politik seorang calon kepala daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi kajian mengenai perilaku politik dan dinamika politik lokal dalam kontestasi pilkada. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar teori yang berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam Pilkada Polman 2024, antara lain :

- Bagi Calon Kepala Daerah dan Tim Kampanye: Penelitian ini memberikan informasi mengenai factor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan politik dan peluang keberhasilan dalam pilkada, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi kampanye yang efektif.
- Bagi Pemilih: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi masyarakat Polewali Mandar tentang kekuatan politik kandidat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilhan berdasarkan analisis objektif.

- Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini memberikan data empiris mengenai dinamika politik di Daerah Polewali Mandar, yang dapat menjadi referensi dalam kajian politik lokal dan perilaku pemilih di Indonesia.

Dari pemaparan manfaat penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu politik sekaligus memberikan dampak nyata dalam proses demokrasi lokal di Polewali Mandar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan referensi dan perbandingan atas penelitian yang akan dilakukan, dimana hasil penelitian tersebut mempunyai relevansi antara keduanya. Tinjauan pustaka juga sebagai usaha dalam mengumpulkan data-data mengenai fakta dan gejala yang sudah ada atau sudah terjadi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian penulis saat ini, diantaranya:

1. Muhammad Fayas Arroihan (2022) dalam skripsi yang berjudul. “Modalitas Lucky Hakim Dalam Pilkada Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2020”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif untuk memperoleh data deskriptif adapun pendekatannya menggunakan studi kasus, juga memfokuskan konsentrasi politik dalam ranah pilkada. Penelitian ini banyak meneliti tentang modal *habitus* yang dimiliki lucky hakim dalam ranah politik sehingga memenangkan Pilkada Indramayu Jawa Barat 2020. Lucky Hakim adalah seorang publik figure nasional yang telah banyak dikenal oleh masyarakat bukan hanya di Indramayu tetapi terkenal diseluruh Indonesia. Sebelum menjadi Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI dapil Jawa Barat VI, sehingga telah memiliki banyak pengalaman di dunia politik. Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis yakni sama-sama meneliti tentang modal yang dimiliki

aktor politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Perbedaannya, Muhammad Fayas Arroihan dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada modalitas *habitus* ketenarang aktor politik sebagai artis sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial aktor politik sebagai pengusaha dan politisi menjelang pemilihan kepala daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Candra (2014) yang meneliti tentang “Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo Pada pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Syahrul Yasin Limpo maju sebagai *incumbent* pada pemilukada Sulawesi Selatan mengoptimalkan kekuatannya di kab. Gowa yakni birokrasi sipil dan partai politik dalam hal ini partai Golkar dan partai pengusungnya serta persiapan yang kemudian ditujukan guna memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya. Dari penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis yakni sama-sama meneliti tentang kekuatan politik kader Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada keluasan lokus yang diteliti, penelitian diatas dilaksanakan di kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Table 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Muhammad Fayas Arroihan (2020)	Modalitas Lucky Hakim Dalam Pilkada Kabuapten Indramayu Jawa Barat 2020	Muhammad Fayas Arroihan dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada modalitas <i>habitus</i> ketenarang aktor politik sebagai artis sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial aktor politik sebagai pengusaha dan politisi menjelang pemilihan kepala daerah	sama-sama meneliti tentang modal yang dimiliki aktor politik untuk memenangkan kepemimpinan kepala daerah
	Akbar Candra (2014)	Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo Pada pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa	perbedaannya terletak pada keluasan lokus yang diteliti, penelitian Akbar Candra dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat	persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis yakni sama-sama meneliti tentang kekuatan politik kader Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah
	Muhammad Nirwansyah (2024)	Kekuatan Politik H. Samsul Mahmud Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Perbedaannya yang paling menonjol dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni modal yang dimiliki oleh aktor	Persamaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang kekuatan aktor politik pada pemilihan kepala

		2024	politik dan keluasan lokus	daerah
--	--	------	-------------------------------	--------

B. Landasan Teori

1. Aktor Politik

a) Pengertian Aktor Politik

Secara terminology “aktor” berasal dari bahasa Latin, yaitu *actor* yang berarti “pelaku” atau “orang yang bertindak”. Dalam konteks umum, aktor merujuk pada individu yang melakukan peran atau memainkan karakter tertentu dalam sebuah cerita, drama, atau film. Mereka bertindak, berbicara, dan berpesan sesuai dengan karakter yang telah ditentukan dalam skrip untuk menyampaikan kisah atau pesan kepada penonton. Dalam pengertian yang lebih luas, aktor juga dapat berarti seseorang yang memainkan peran penting atau berperan aktif dalam suatu peristiwa atau kegiatan tertentu di luar dunia seni peran, seperti dalam bidang politik, sosial, atau ekonomi.

Secara harfiah, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani *polis*, yang berarti kota atau negara-kota. Istilah ini awalnya mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan urusan negara atau masyarakat di dalam sebuah negara-kota. Kemudian, istilah ini berkembang menjadi “politik” yang kita kenal saat ini, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan, dan cara-cara untuk mencapai, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan di dalam masyarakat. Sedangkan Menurut Miriam Budiardjo (2012 : 16) politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-

kelompok mencapai keputusan–keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Jadi, aktor politik merupakan orang atau individu yang berkesempatan atau mempunyai kemampuan duduk menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki andil dalam pembuatan kebijakan negara. Aktor politik merupakan orang-orang yang berperan dalam bidang politik dan pemerintahan karena status dan jabatannya atau karena prestasi yang telah diraihinya. Aktor politik juga merupakan orang-orang yang dipilih dan ditunjuk untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963), mendefinisikan aktor politik sebagai bagian dari kultur politik yang terlibat dalam proses demokrasi. Mereka mengklasifikasikan aktor politik sebagai pihak yang membentuk budaya politik, baik dari kalangan elite maupun masyarakat umum yang memainkan peran dalam proses politik.

Setiap aktor politik memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, kepentingan tersebut bisa bersifat ekonomi, ideologis, sosial atau pribadi. Aktor politik juga mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan dan dipertahankan, baik secara formal (melalui jabatan) maupun informal (melalui jaringan atau pengaruh).

Barrington Moore Jr. seorang sosiolog dan ilmuwan politik, terkenal dengan pandangannya tentang perkembangan politik dan sosial. (Dalam bukunya yang berjudul *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, 1966), Moore menekankan bahwa aktor-aktor politik utama dalam proses transisi menuju sistem politik modern adalah kelas sosial seperti kaum borjuis, petani, dan tuan tanah, yang secara historis memiliki peran besar dalam bentuk arah politik suatu negara. Menurut Moore, aktor politik dalam bentuk kelas-kelas sosial memiliki pengaruh yang menentukan terhadap jalur politik suatu negara, apakah menuju demokrasi, kediktatoran, atau komunisme.

Secara rasionalitas, aktor politik dianggap sebagai entitas rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat dan kerugian demi mencapai tujuan mereka, seperti mempertahankan kekuasaan, memenangkan dukungan public, atau mencapai kebijakan tertentu. Aktor politik menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan mereka termasuk kampanye, negosiasi, koalisi, dan bahkan manipulasi opini public.

b) Kategori Aktor Politik

Gaetano Mosca (dalam Brian McNair, 2011) mengatakan, bahwa dalam mengidentifikasi aktor politik, maka terdapat tiga metode yaitu : *pertama*, metode posisi aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yang dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Aktor ini

jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, dan kelompok kepentingan. *Kedua*, metode reputasi aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian merumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. *Ketiga*, metode pengaruh atau keputusan aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan.

Dalam bukunya *who Governs? Democracy and Power in an American City* (1961), Dahl menjelaskan bahwa dalam sistem politik yang demokratis, kekuasaan tidak berpusat pada suatu kelompok atau individu melainkan tersebar di antara berbagai aktor politik yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Menurutny, aktor politik ini meliputi individu, partai politik, kelompok kepentingan, serta organisasi yang bersaing untuk mempengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, aktor politik yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu memiliki peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Aktor politik dalam demokrasi dapat menjaga sistem tetap terbuka dan kompetitif karena adanya distribusi kekuasaan yang relative seimbang.

Adapun aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan politik dalam mempengaruhi sistem pemerintahan dan penentuan kebijakan di Indonesia, meliputi:

- Politisi: Individu yang terlibat langsung dalam politik, seperti anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati dan walikota, dst.
- Partai Politik: Organisasi yang bertujuan untuk memenangkan kekuasaan politik dengan mencalonkan kandidat dalam pemilu.
- Kelompok Kepentingan: Organisasi yang memperjuangkan kepentingan tertentu, seperti organisasi buruh, organisasi lingkungan, atau kelompok industry.
- Media: Sumber informasi yang memiliki peran besar dalam membentuk opini public dan dapat mempengaruhi isu-isu politik.
- Organisasi Non-Pemerintah: Lembaga independen yang terlibat dalam advokasi dan isu-isu sosial.
- Masyarakat Sipil: Kelompok warga negara yang terlibat dalam kegiatan politik secara independen, seperti aktivis atau komunitas-komunitas.

2. Definisi Modal

Secara etimologis, kata “modal” berasal dari bahasa Latin “*capital*” yang berarti “utama” atau ”pokok”. Istilah ini berkaitan dengan kata “caput” yang berarti “kepala”, menandakan sesuatu yang bersifat penting atau mendasar. Dalam perkembangannya, istilah ini merujuk pada aset atau kekayaan yang

merupakan sumber daya utama dalam kegiatan ekonomi. Dalam bahasa Inggris, istilah “*capital*” kemudian berkembang untuk menggambarkan berbagai bentuk kekayaan atau sumber daya yang dapat diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, seperti uang, property, atau kemampuan individu.

Modal adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang digunakan untuk menciptakan nilai atau keuntungan ekonomi. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, modal tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup aset fisik seperti gedung, mesin, peralatan, serta aset non-fisik seperti pengetahuan, keterampilan, hubungan sosial, dan kekayaan intelektual.

Konsep modal berdasarkan cirinya mampu menjelaskan hubungan kekuasaan. *Pertama*, modal terakumulasi melalui investasi. *Kedua*, modal bisa diberikan kepada yang lain. *Ketiga*, modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki untuk mengoperasikan penempatannya (Pierre Bourdieu, 1995).

Modal merupakan hubungan sosial, artinya suatu energy sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam arena dimana ia memproduksi dan mereproduksi. Setiap kepemilikan yang terkait dengan kelas menerima nilai dan efektivitasnya dari hukum khas setiap arena, artinya dalam suatu arena khusus, semua disposisi dan kepemilikan objektif. Pendekatan ini memperhitungkan bahwa setiap kelas terpisah, tetapi selalu dalam hubungan dengan kelas lain.

3. Teori Modal Politik

a) Pengertian Modal Politik

Teori modal politik berkaitan dengan kekuasaan, jaringan, dan pengaruh yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik atau memperkuat posisi dalam struktur sosial dan politik. Modal politik menjadi aset yang strategis bagi aktor politik dalam membangun kekuatan, mendapatkan dukungan, serta melegitimasi keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, modal politik meliputi segala sumber daya yang digunakan aktor politik untuk mempengaruhi dan menarik simpati masyarakat serta pengalokasian sumber daya di tingkat pemerintahan dan organisasi politik.

Menurut Edward C. Banield bahwa modal politik dapat digunakan untuk jenis pertukaran antara politisi dan pemilih seperti halnya uang. Modal politik harus dibelanjakan dan disimpan dengan bijak atau seorang politisi akan bangkrut dalam waktu dekat (Political Influence, 1961).

Modal politik dapat dipahami sebagai metafora yang digunakan dalam teori politik untuk mengkonseptualisasikan akumulasi sumber daya dan kekuasaan yang dibangun melalui hubungan, kepercayaan, niat baik dan pengaruh antara politisi atau partai dan pemangku kepentingan lainnya seperti kontituen. Modal politik dapat dipahami sebagai jenis mata uang yang digunakan untuk memobilisasi pemilih mencapai reformasi kebijakan atau mencapai tujuan politik lainnya.

b) Aspek-aspek Modal Politik

Modal politik merujuk pada semua sumber daya yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu sistem politik. Dalam konteks pilkada, aspek-aspek modal politik dapat mencakup:

- Kepemimpinan dan karisma: Figure Calon Kepala Daerah yang memiliki daya tarik dan kemampuan memimpin.
- Partai Politik: Dukungan dari Partai Politik yang kuat dapat memberikan legitimasi dan jaringan yang luas untuk calon.
- Jaringan dan koalisi: Kemampuan untuk membangun aliansi dengan aktor politik lain, termasuk tokoh masyarakat dan klan politik lokal.
- Pengalaman politik: Rekam jejak dalam politik dapat menjadi modal dalam membangun kepercayaan pemilih.

c) Relevansi Teori Modal Politik dalam Konteks Pilkada

Dalam konteks pilkada, teori modal politik dapat digunakan untuk menganalisis:

- Daya Saing Calon: Mengidentifikasi bagaimana kepemimpinan, dukungan partai, dan jaringan sosial memengaruhi daya saing calon kepala daerah.

- Strategi Kampanye: Memahami bagaimana calon memanfaatkan modal politik untuk meraih dukungan pemilih melalui kampanye yang efektif.
- Persepsi Public: Menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap calon terkait dengan modal politik yang dimiliki.

Teori modal politik memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika kekuatan politik menjelang pemilihan kepala daerah kabupaten Polewali Mandar 2024.

4. Teori Modal Ekonomi

a) Pengertian Modal Ekonomi

Modal ekonomi adalah sumber daya finansial dan material yang tersedia sehingga kepemilikan ekonomi meningkatkan kapasitas, mobilitas, dan kekuasaan individu dalam masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu (1986), Modal ekonomi sebagai hal terpenting dalam mengidentifikasi agen sosial dalam hierarki kelas yang mengakibatkan modal ekonomi tidak merata dan bercirikan hukum transmisi.

Modal ekonomi atau capital adalah hal yang paling utama namun juga didukung oleh modal-modal yang lain seperti modal budaya dan modal sosial yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan ranah dan habitus. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa konsep-konsep tentang modal saling berkaitan dan saling mendukung.

b) Aspek-aspek Modal Ekonomi

Dalam ranah Pemilihan Kepala Daerah, aspek-aspek modal ekonomi mencakup:

- **Pendanaan Kampanye:** Salah satu aspek utama modal ekonomi adalah kemampuan untuk mengumpulkan dana kampanye. Calon yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar cenderung lebih mampu menjalankan kampanye yang efektif, seperti iklan, acara public, dan promosi.
- **Akses ke Sumber Daya Ekonomi:** Kandidat yang memiliki hubungan baik dengan pengusaha atau investor dapat memperoleh dukungan finansial yang signifikan. Ini seringkali mencakup sumbangan untuk kampanye yang memungkinkan calon untuk menjangkau pemilih dengan lebih efektif.
- **Keterlibatan dalam Proyek Ekonomi:** Modal ekonomi juga mencakup keterlibatan dalam proyek-proyek ekonomi yang dapat meningkatkan popularitas calon. Misalnya, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur atau program ekonomi lokal dapat memberi citra positif dimata masyarakat.

c) Relevansi Modal Ekonomi dalam Konteks Pilkada

Teori modal ekonomi dapat diaplikasikan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah melalui beberapa perspektif:

- **Kekuatan Finansial:** Mengidentifikasi bagaimana kekuatan finansial calon dalam berkontribusi pada strategi kampanye dan kapasitas untuk menarik simpati pemilih.
- **Dukungan Sektor Bisnis:** Menganalisis peran dukungan dari sektor bisnis dalam membangun legitimasi dan kekuatan politik calon. Hubungan yang baik dengan pengusaha dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam konteks kampanye.
- **Pengaruh terhadap kebijakan:** Modal ekonomi juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diusulkan oleh calon. Calon yang didukung oleh kelompok ekonomi tertentu mungkin cenderung mengadopsi kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut setelah terpilih.

Modal ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Misalnya, calon yang memiliki kemampuan untuk mendanai kampanye mereka dengan baik, seringkali menunjukkan hasil yang lebih baik di kotak suara.

5. Teori Modal Sosial

a) Pengertian Modal Sosial

Bourdieu adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengembangkan konsep modal sosial. Bourdieu menjelaskan bahwa modal sosial terdiri dari sumber daya actual atau potensial yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang didasarkan pada jaringan relasi yang langgeng. Bourdieu menekankan bahwa modal sosial memungkinkan akses ke modal lain, seperti modal ekonomi, dan modal budaya (Pierre Bourdieu, 1986). Sedangkan Putnam mengembangkan konsep modal sosial dalam konteks komunitas dan masyarakat sipil. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial mencakup dua jenis, yaitu bonding social capital (modal sosial pengikat) dan bridging social capital (modal sosial penghubung). Ia menekankan pentingnya partisipasi sosial dan jaringan dalam memperkuat modal sosial untuk kesejahteraan masyarakat (Robert Putnam, 2000).

Jadi, modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama diantara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks politik, modal sosial menjadi penting karena dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap Calon Kepala Daerah dan cara calon berinteraksi dengan pemilih.

b) Aspek-aspek Modal Sosial

Abdullah (dalam Suwartiningsih, Sri & Prananingrum, Dyah Hapsari, 2009) mengidentifikasi tiga bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat yaitu :

- Ideology dan tradisi lokal yang mangacu pada paham tertentu dalam menyikapi hidup dan menentukan tatanan sosial. Hal ini berupa kepercayaan setempat yang merupakan basis bagi legitimasi tindakan sosial; ajaran yang menjadi sistem acuan dalam tingkah laku yang terwujud; etika sosial mengatur hubungan antar manusia dangan manusia atau lingkungan ; etos kerja; dan norma yang merupakan perangkat aturan tingkah laku.
- Hubungan dan jaringan sosial yang merupakan pola-pola hubungan antar orang dan ikatan sosial dalam suatu masyarakat seperti kerabat atau ikatan ketetanggaan.
- Jaringan terdapat dalam masyarakat, menjangkau institusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Ini dapat berupa kelembagaan adat atau pranata sosial yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung.

c) Relevansi Modal Sosial dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah

Teori modal sosial dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah melalui beberapa perspektif:

- Pengaruh Jaringan Sosial: Memahami bagaimana jaringan sosial calon mempengaruhi kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan. Calon yang memiliki jaringan luas cenderung lebih efektif dalam menjangkau pemilih.
- Partisipasi dan Aktivisme: Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung calon. Modal sosial yang tinggi seringkali terkait dengan tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan kampanye.
- Strategi Komunikasi: Modal sosial juga dapat mempengaruhi strategi komunikasi calon dengan pemilih. Calon yang mampu membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal seringkali lebih berhasil dalam menyampaikan pesan kampanye.

C. ALUR PIKIR

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah serta merujuk pada landasan teori sebelumnya. Maka penulis menganalisis bahwa modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kekuatan politik H. Samsul Mahmud menjelang Pilkada Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dapat menggali bagaimana interaksi antara modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial sinergis untuk

memperkuat basis electoral H. Samsul Mahmud di Pilkada Polman 2024. Secara sederhana alur pikir penelitian dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2



tahunnya dan memiliki hubungan yang erat dengan beberapa tokoh agama seperti K.H. Muhammad Ilham Saleh yang dianggap sebagai guru spiritualnya dan Salim S. Mengga yang dianggap sebagai orang tua.

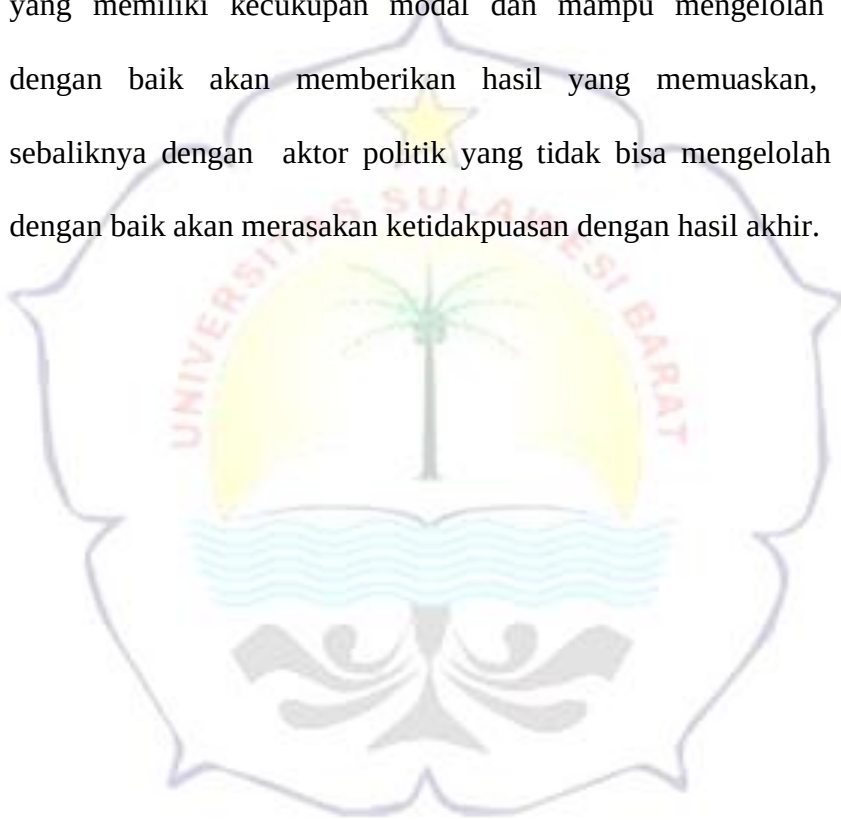
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengungkapkan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Dengan modal politik yang dimiliki dapat dimanfaatkan melalui jejaring keluarga yang duduk dikursi legislative dan kedekatan dengan klan Masdar yang sudah mapan di Polman terutama di wilayah yang menjadi basis massa di pemilihan-pemilihan sebelumnya. Mobilisasi pendukung setia akan menjadi kunci untuk memastikan basis suara tetap utuh.
2. Dengan modal ekonomi yang dimiliki memungkinkan kampanye tatap muka yang intensif dan pendekatan personal dengan pemilih menjadi strategi efektif untuk meraih dukungan yang lebih luas. Aji Assul dapat memanfaatkan kekuatan politiknya yang dikenal dekat dengan masyarakat untuk melakukan kampanye dialogis di berbagai wilayah. Strategi ini memungkinkan untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.
3. Dengan modal sosial yang dimiliki perlu membangun narasi keberlanjutan pembangunan, strategi ini bisa diwujudkan dengan menonjolkan program-program sosial yang telah dibuktikan selama ini. Menyampaikan pesan kampanye yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, kesejahteraan

ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan akan menarik banyak pemilih.

Kata kekuatan politik dapat dibahasakan dengan kata “modal” dalam versi kontestasi politik, seperti halnya Pilkada. Modal yang dimaksud disini ialah sumber daya yang dimiliki seorang aktor politik dalam menguatkan dirinya sebagai kandidat yang memiliki daya saing. Sehingga aktor politik yang memiliki kecukupan modal dan mampu mengelolah modalnya dengan baik akan memberikan hasil yang memuaskan, begitupun sebaliknya dengan aktor politik yang tidak bisa mengelolah modalnya dengan baik akan merasakan ketidakpuasan dengan hasil akhir.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiarjo, Miriam,(1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Cohen, William A, (2001). *Seni Kepemimpinan*, Jakarta: Mitra Utama.
- Hafel, Muhlis,(2011). *Kekuatan-keuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: Semarak Tata Warna.
- Haniah Hanafie & Ana Sabhana Azmy,(2018). *Kekuatan-Kekuatan Politik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, Syarifuddin,(2016). *Kekuatan-keuatan Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mufti, Muslim,(2013). *Kekuatan-keuatan Politik di Indonesia,,* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mufti, Muslim,(2019). *Teori-teori Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Mukarom, Zaenal,(2016). *Komunikasi Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sahuding, Sarman,(2006). *Dalam Sejarah Akan Dikenang (Jejak Langkah & Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005)*, Majene: Yayasan Tinta Mandar Sulawesi Barat.
- Varma, S.P, (2001). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.